

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____ dan Ali Safaat. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen MK RI, Jakarta.
- Atmasista, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Atmosuirjo, S. Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Danuredjo, SLS. 1967. *Otonomi di Indonesia dalam Rangka Kedaulatan*. Alras, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwipayana, AAGN. Ari. 2003. *Membangun Good Governance*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Fadjar, A. Mukthie. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Setara Press, Malang.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- HR, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*, Yuridika, Surabaya.

- _____. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Setara Press, Malang.
- Hidjaz, Kamal. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Indonesia, Masyarakat Transparansi. 2002. *Supermasi Hukum*. Modul, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 208. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media, Bandung.
- Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan Cetakan I*. LP3ES, Jakarta.
- M.D, Moh.Mahfud. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
- Marbun, SF. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud . 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif pilihan di Masa Transisi*. Huma, Jakarta.

- _____ dan Philip Selznick. 2015. *Hukum Responsif*. Nusa Media, Bandung.
- Nurcholis, Hanafi. 2005. *Teori Dan Praktek Pemberitaan dan Otonomi Daerah*. PT.Grasindo, Jakarta.
- Purbacarakan, Purnadi dan Soekanto, Soerjono. 1980. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Pranadjaja, Muhammad Rohidin. 2003. *Hubungan Anta Lembaga Pemerintahan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Hukum Dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- _____. 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dosminikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*. PT. Persindo, Yogyakarta.
- Ridwan, Juniarso, Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa, Bandung.
- Sedarmayanti. 2012. *GOOD GOVERNANCE “Kepemerintahan Yang Baik”*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakkan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- _____. 1985. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____. 1988. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. CV. Ramadja Karya, Bandung.
- _____. 1989. *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- _____. 2006. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. UI Press, Jakarta.
- _____. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-17. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Jakarta.

- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses Dan Teknik Penyusunan, Edisi Revisi*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sunarno, H. Siswanto. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarso. 2013. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Ombak, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti, Dyah Ochtorina, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- T, Titik Triwulan dan Widodo, Ismu Gunadi. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Indonesia Press, Jakarta.
- Tanya, Bernart L. 2007. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. CV.Kita, Surabaya.
- Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

B. Tesis

- Mayandri Suzarman, "Tinjauan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU-IV/2006 dan Implikasinya terhadap Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial", Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

C. Jurnal

- Aditya, R. Ilham Asri Aditya, Zulfanetti, and Heriberta, "Evaluasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* 16, no. 1 (2021): 151–66, <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i1.11822>.
- Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia", *Law Reform, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019*.

- Apendi, Sofyan. “Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 07, no. 1 (2021): 111–26, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.
- Astuti, Feni “Optimization of Development Funds to Achieve Dynamic Sustainable SME’s,” *Publilca: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 15, no. 1 (2023): 189–205.
- Christia, Adissya Mega dan Ispriyarso, Budi, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia”, *Law Reform, Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019*.
- Damayanti, Theresia Woro Damayanti. ‘Pemanfaatan E- Billing Untuk Pembayaran Pajak : Pendampingan Usaha Restoran’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat, 01.1 (2020)*, hlm. 25–31.
- Dewi, Riska Chyntia, Suparno “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik” *Jurnal Media Administrasi Vol. 7, No. 1, April 2022*.
- Elpah, Dani and Manao, D. F. “Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Peratun* 2, No. 1 (2019).
- Eriza, Winda Meylen dan Affandi, Hernadi. “Implikasi UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Simplifikasi Pajak Dan Retribusi Di Daerah”, *Rio Law Jurnal Volume. 5 Nomor. 1, Februari-Juli 2024*.
- Julyano, Mario and Sulistyawan, Aditya Yuli, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Maharani, Indah, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Hukum Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol.1 No.3 (November 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud, “Penelitian Hukum”, *Yuridika,- Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume 16, (2002)*.
- Muhtadin,” Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pemerintahan Dalam Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah”, *AHKAM Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Volume 2, Nomor 2, Juni 2023*.
- Nurhalizah, Syarifah, Valensia, Meisia Viona, and Maharani, Karina Dwi. ‘Keseimbangan Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Dalam Efektifitas Sistem Pemerintahan’, *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1.03 (2022), hlm.416.

Nurhidayat, Ipan, “Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia”, *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government Volume 1 Nomor 1*, Februari 2023.

Putri, Mareta Rahmawati Putri, Fauziyah, dan Srikalimah, “Pengaruh Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi PKB Dan BBNKB Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *MUSYTARI* 8, no. 11 (2024).

Purnamawati, Evi, “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal Unpal Vol 19 No.1* (2021).

Purwitasari, Aulya, Binti Mutafarida, Yuliani, “Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *JIEM - VOLUME 2, NO. 6, JUNI 2024*.

Ridwan, ‘Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial The Existence and Urgency of Ministry’, *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2021), hlm. 841.

Rizka, Ayu Rizka et all. “Pemaknaan Asas Legalitas Dalam Hukum Indonesia (Suatu Kajian Teoritis)”, *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8, No. 2, Desember 2023*.

Sitorus, Antoni S et al. “Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Kebijakan Perlindungan Kecelakaan Jalan,” *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)* 9, no. 1 (2022): 60–70, <https://doi.org/10.46447/ktj.v9i1.426>.

Suhartono, Slamet, “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2*, Agustus 2019 – Januari 2020.

Uguy, Cindi. “Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Kaweruan Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara” *Jurnal eksekutif* 4.4, 2019.

Winarno, Andrias, et.all Bambang Sugiri dan Yuliati Cholil, “Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial”, *Media Iuris Vol. 4 No. 3*, Oktober 2021.

D. Seminar

Hasyim, A. Dardiri. Good Governance dan Piagam Madinah, disampaikan dalam Seminar Nasional Dan Call For Papers UNIBA 2014.

Atmadja, Dewa Gede. Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996, hlm.2.

Hadjon, Philipus M. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 1994, hlm, 7.

E. Modul

Ratnia Solihah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan "Perihal Pemerintah dan Yang Diperintah"*.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, "Pelimpahan Kewenangan pada Lembaga Negara", 2018, hlm, 6.

F. Website

Irda, Shalli, Pengenaan Pajak Kendaraan & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2023 <https://news.detik.com/berita/d-7590310/pengenaan-pajak-kendaraan-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-2023>, Diakses 25/10/2024.

Info, Samsat, Nilai Jual Kendaraan Bermotor <https://samsat.info/cek-nilai-jual-kendaraan-bermotor-online>, Diakses 25/10/2024.

Santoso, Muhammad Rifki, Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor-Nilai Jual <https://klc2.kemenkeu.go.id/> 31/7/2024. Diakses 25/10/2024.

G. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.